

**PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA
KERJA**

Skripsi

***Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara***



Oleh :

Fadli Jumadi

1813030082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2023 M / 1444 H**

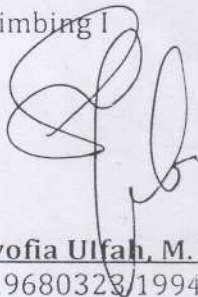
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA" yang disusun oleh Fadli Jumadi NIM: 1813030082 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

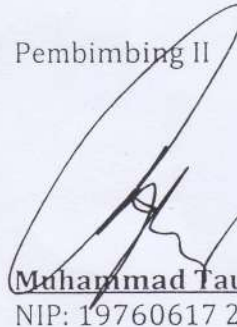
Padang, 28 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Syofia Ulfah, M. Pd, Ph.D
NIP: 19680328/199403 2 003

Pembimbing II



Muhammad Taufik, S.Ag. M.Si
NIP: 19760617 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA** yang disusun oleh Fadli Jumadi NIM 1813030082 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah

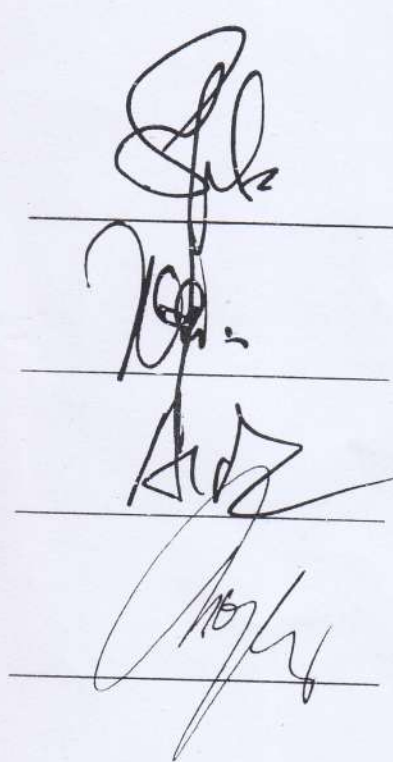
Disahkan di : Padang
Tanggal : 25 September 2023
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph. D
NIP: 19680323 199403 2003
Penguji I / Pembimbing I

Alfadli, M.Ag.
NIP: 19780331 200312 2003
Penguji II (Utama)

Aidil Aulya, MA. Hk.
NIP: 19890713 201903 1019
Penguji III

Muhammad Taufik, S.Ag. M.Si
NIP: 19760517 200501 1004
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwani, S.H., M.Ag.
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 13 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



Fadli Jumadi
1813030082

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadli Jumadi

NIM : 1813030082

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang
Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 13 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



Fadli Jumadi
1813030082

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan pertolongan kepada setiap hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA”**. Salawat beserta salam penulis doakan kepada-Nya semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan kehidupan yang disertai dengan iman dan takwa serta kehidupan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini penulis tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Selama proses pembuatan skripsi penulis menemukan berbagai tantangan. Namun berkat dukungan, semangat dan juga bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada tiga orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis yaitu Ayahanda Karman, Ibunda Rita Erlina, dan Bibi Ardiati, S.Pd. Kemudian terima kasih penulis sampaikan untuk seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Wakil I Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Yasrul Huda, MA, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Testru Hendra, M. Ag serta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Welhendri Azwar, S. Ag, M.Si, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Ikhwan S.H, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., MH yang telah mewadahi penulis dalam proses pembelajaran di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Alfadli, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Muhammad Yazid, S.H.I., M.H yang telah memotivasi penulis dalam menulis skripsi;
4. Penasehat Akademik (PA) penulis Bapak Muhammad Taufik, S.Ag. M.Si yang selama ini senantiasa mengarahkan penulis dalam proses pendidikan dan memberikan masukan untuk kemajuan skripsi penulis;
5. Pembimbing I Ibu Dr. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph. D dan Pembimbing II Bapak Muhammad Taufik, S.Ag. M.Si yang telah dengan sabar membimbing, menuntun dan meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi;

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah yang telah memberikan proses kepada penulis di luar bangku perkuliahan untuk mempelajari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, keumatan dan kepemimpinan;
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018 kelas C yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama mengenyam dunia perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang
9. Saudara/i penulis yaitu Adik Maharani Karlina, Adik Najwa Ramadhina. Abang Sepupu penulis yaitu Maristio Ardian Pratama. yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kawan saiyo (Se-iya) : Alif Maarifatullah S.T, Aulia Rahman Putra Asril, Alm. Abdul Rahmi, Abdul Rahman, Alfi Sutri Khaira, dll semua Anak Bilik Kecil Pakotan (ABK) dan Keluarga Besar Alumni Generasi-03 SMAN 6 Pariaman.
11. Kawan perjuangan : Mutammimul Irsyad, Arif Rahman Hakim, Muhammad Ilham, Aprilia Putri SH, Rihdo Rizki Samnofrianto SH, Sagita Putri Siregar, Rizki Juwanda SH, Idham Kholid.
12. Abang kami Yohan Fitriadi, SHI, MM , Ifdal Lillahi SH serta Keluarga Besar Yayasan Senarai Sumatera Barat dan Cita Teknologi.
13. Uda-uda, Uni-uni, Kawan-Kawan, Adiak-adiak keluarga besar Forum Mahasiswa Kantin Syariah (FORMAKA)

Akhir kata, doa penulis mohonkan untuk seluruh pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan menjadi nilai pahala nantinya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 13 Agustus 2023
Penulis,



Fadli Jumadi
NIM. 1813030082

ABSTRAK

Berangkat dari putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengujian formil undang-undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang memutuskan UU tersebut Inkonstitusional Bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis putusan Mahkamah Konstitusi, tata cara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan seperti apa pendekatan Sosiologis Hukum untuk mencapai amar putusan Inkonstitusional Bersyarat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian hukum normatif (*normatif law researsch*) dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) serta sumber data penelitian yang terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 11 Tahun 2020, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020) . Bahan penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode Dokumentasi, dan diolah menggunakan Teknik Analisis Isi. **Pertama**, Putusan Inkonstitusional Bersyarat berangkat dari beberapa alasan sosiologis dalam pengujian formil UU cipta kerja, pada garis besarnya adalah tidak terpenuhinya prosedur pembentuk UU yang mana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011. Jenis putusan ini dalam posisinya merupakan jenis putusan yang sah karena ini merupakan Putusan *Jurisprudence*, dalam praktik sebelumnya putusan seperti ini sudah pernah ada diterapkan. MK menganggap putusan ini bersifat tafsiran (*Interpretative Decision*), Karena MK dalam UUD 1945 juga mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan membuat hukum baru melalui putusannya. MK bersifat pertama dan yang terakhir maka putusan MK itu mengikat dan harus dianggap benar. **Kedua**, Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan stabilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan masyarakat dalam putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi memerintahkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melanjutkan peraturan turunan, memperbaiki segala pelanggaran prinsip konstitusional, dan menjadi acuan dalam proses Hukum Acara. Dengan demikian, nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi mampu meredam keributan yang berada pada masyarakat dan memberi ruang untuk masyarakat dengan legislatif berkonsolidasi selama masa tangguhan tersebut. Mahkamah Konsitusi merupakan lembaga formal Pemerintahan yang punya wewenang dan hak dan di atur oleh UUD, maka dampak dari putusan ini telah terjadi pengendalian sosial formal yang norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal.

Kata kunci: Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikasi Penelitian.....	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Landasan Teori	9
1.8 Metode Penelitian	12
BAB II.....	16
2.1 Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.....	16
2.1.1 Kekuasaan Kehakiman.....	16
2.1.2 Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	18
2.1.3 Wewenang, Kewajiban, dan Tugas Mahkamah Konstitusi	22
2.1.4 Proses <i>Judicial Rewiew</i> ke Mahkamah Konstitusi.....	28
2.1.5 Metode Penafsiran Hukum.....	43
2.1.6 Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	45
2.2 Hukum Sebagai Pengendali Sosial (<i>Control Social</i>)	47
2.2.1 Sosiologi Hukum	47
2.2.2 Hukum Sebagai Pengendali Sosial (<i>Control Social</i>)	54
BAB III	57

3.1 Kronologis Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020	57
3.2 Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020	59
3.2.1 Pokok-Pokok Permasalahan dan Pertimbangan Hukum	60
3.2.2 Amar Putusan	70
3.3.3 Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>).....	71
BAB IV.....	74
4.1 Analisis Posisi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Kekuasaan Kehakiman di Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020	74
4.2 Bentuk Pertimbangan Sosiologi Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020	80
BAB V	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87
BIODATA.....	88